

n kecil yang memproduksi rokok dengan harga
tidak semua orang menolak keberadaan rokok
k dilengkapi dengan Pita Cukai merupakan salah
mun masih banyak dilakukannya penyelewengan
kerugiannya juga tidak sedikit. Beberapa tahun
ok yang tidak dilekati pita cukai masih banyak
asil tembakau masih menjadi primadona bagi
pajakan khususnya cukai disamping pengenaan
Etil Alkohol dan Etil Alkohol.

duk rokok dan tembakau telah memberikan
gi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu
ral Bea dan Cukai menghimpun pendapatan bagi
ai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh

*n Hukum Pidana Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri
ng Cukai. Skripsi Tahun 2009, hlm. 14*

nya tidak adanya pembayaran pita cukai oleh menengah dan kecil, serta adanya pita cukai pada al Eceran rokok, sehingga bisa dipastikan Harga oleh industri rokok yang berskala menengah dan ang diproduksi oleh industri rokok yang berskala perkembangan industri rokok yang semakin terjadinya tindak pidana cukai, maka pemerintah or 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana ng Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan 1995 Tentang Cukai. Tetapi pelaksanaan Undang- tang Cukai disadari masih terdapat hal-hal yang malkan upaya pengawasan dan pengendalian serta ebagai salah satu sumber penerimaan negara

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari

untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau

perdagangan selain etil alkohol dan minuman yang

diperdagangkan dengan peraturan Menteri.⁴

Denda dikenakan kepada orang yang tidak

mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1995 tentang sanksi pidana dikenakan dalam hal ditemuinya

kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1995 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai yang

tersebut adalah mengelakkan pembayaran pungutan

kecamatan Jeparu yang masuk dalam analisis ini

oleh Fuad Bin Muzahim Alm, yang merupakan

lakang di atas, maka penulis tertarik untuk
masalah cukai rokok ilegal dengan mengangkat
lana Terhadap Pelaku Yang Tanpa Izin
Dengan Maksud Mengelakkan Pembayaran
(Pid.Sus/2021/PN.Jpa).

ini masalah dapat dirumuskan sebagai suatu
n suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan
pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan
elitian seseorang akan dapat mengetahui apakah
n rumusan masalah dapat dijawab seluruhnya.
maksudkan yaitu:

ri penelitian adalah sebagai berikut:

tanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang

n kegiatan pabrik dengan maksud mengelakkan

di putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jpa)!

asar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

ku tindak pidana yang tanpa izin menjalankan

a maksud mengelakkan pembayaran cukai (Studi

d.Sus/2013/PN.Jpa)!

kan dapat bermanfaat sebagai pemasukan untuk

dan referensi dibidang ilmu hukum khususnya di

engenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap

kai/ rokok yang tidak dilekati pita cukai.

bagi diri sendiri diharapkan dapat menambah

kemampuan penulis dalam bertanggung jawab

kebijakan atau keputusan terhadap suatu

penulis hadapi.

ggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan

elaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana

nampuan bertanggungjawab). Oleh karena itu,

s diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang

. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa,

ar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan

t yang akan dijadikan alasan pembenar bilamana

na untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

rkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan

maka ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi

tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban
ta, hlm.70

ana. Mandar Maju, Bandung, hlm. 186

g berbunyi:⁷

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya
karena penyakit, tidak dipidana;
dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan
nyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang
a, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
aku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan

dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang
maksud dengan pertanggungjawaban. Pasal tersebut
tanggungjawaban yang dirumuskan secara negatif,
melaku tindak pidana menunjukkan kemampuan
tanggungjawaban pidana.

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai
pada pada perbuatan pidana dan secara subjektif
na perbuatannya itu”.⁸ Maksud dari celaan objektif
eh seseorang memang merupakan suatu perbuatan
n tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan
erihal. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk
ng dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang

, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan*

dana

untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau
i, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang
maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang
bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan
lah:

atau unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena
tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan
yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai
Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine*
pidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-
ngenai larangan perbuatan tersebut¹⁰.

¹⁰ 5, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 205
a, Edisi revisi, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 25

perbuatan yang itu kesalahan yang sebenarnya lupa
out perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas
dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif.
an yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan
ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa
ya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk
eal, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena
dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang
normatif. Kesalahan normatif merupakan kesalahan
na hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan

um dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

diri tidak memberikan definisi mengenai apa yang
ngga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan
apat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah
ul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang
di karena perilaku dari orang itu sendiri.

persyaratan yang dapat dimintakan pelaku
imnya diliputi hubungan batin si pelaku dengan
gan kesengajaan maupun kelalaian.¹⁵

wa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd*
perbuatan seseorang secara konkret sedangkan di
batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu
kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

ng jawab

dana, Rineka Cipta, Cet III, Jakarta, hlm. 106
akarta, hlm. 143

...tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung
UHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan
mengatur tentang kebalikan dari kemampuan
HP yang berbunyi;

...n yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya,
dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau
pidana.

...n tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya
dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit,
supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit
ai waktu percobaan.

...g melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung

...akukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan

...ntuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku

...ng pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan

...an tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan.

...elaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu

tindakan pidana dapat dibuat namun dengan alasan tersebut
ena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain

t.¹⁸

an pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar

sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan

bedakan karena keduanya memiliki fungsi yang

alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran”

n hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada

pun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak

masuk alasan pembenar seperti keadaan darurat,

aturan Perundang-undangan, menjalankan perintah

erupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu

i dilema situasi untuk memilih suatu tindakan.

salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga

serangan merupakan atau serbuan itu terhadap benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam usun. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah suatu serangan yang akan terjadi.²¹

ksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana ab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ng dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut enai suatu hal yang telah diperbuat.

paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan kan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara dapat ada karena tindakan seseorang atau tekanan lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut

...cukai sebagai sumber pendapatan Negara, Hal ini
yang diterima dari sektor cukai yang cukup besar
lain yaitu untuk pembatasan konsumsi masyarakat

...dana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu
...seorang dengan tidak dikemas untuk penjualan
...suatu negara. Segala perbuatan yang berhubungan
...cam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam
...ng perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun

...a cukai merupakan salah satu unsur penting dalam
...ena itu pengawasan di bidang cukai pun harus baik
...gat penting dalam penyelenggaraan Negara yaitu
...n di bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi

-pelanggaran mana yang termasuk tindak pidana
jawab atas pelanggaran tersebut dan hukuman atau
pelanggar maka penulis dalam karya tulis ini akan
ukai sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang

yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU

C yang diatur di dalam Pasal 50 UU No. 11 Tahun
setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana
kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau
melakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang

pengeluaran BKC yang diatur di dalam Pasal 52 UU
tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha
n BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa
dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud

...penggunaan dan/atau tanda BKC yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan/atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

...dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (2) Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda cukai yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang harus dibayar.

...penggunaan pita cukai bekas BKC yang diatur di dalam Pasal 30 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang: 1) meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda cukai, 2) menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai, dan 3) mempergunakan, menjual, menawarkan, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

...yang diatur di dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun 2008, yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, atau menguasai BKC yang diketahuinya atau patut harus diketahuinya berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

...pengamanan BKC yang diatur di dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun 2008, yaitu setiap orang yang tanpa izin

... dan setiap orang yang secara sadar dan mengambes
... n pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai,
... tingkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
... 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
... (rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
... penuhi-punahnya pungutan negara berdasarkan undang-
... ara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10
... a paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
... 000,00 (lima milyar rupiah).

... dan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan,
... diatur di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo.
... suatu tindak pidana menurut undang-undang ini
... hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan
... ksi pidana dijatuhkan terhadap: 1) badan hukum,
... yayasan atau koperasi tersebut, 2) mereka yang
... tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai
... hannya. Tindak pidana menurut undang- undang ini
... badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan,
... dana tersebut dilakukan oleh orang- orang, baik
... berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam
... perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi
... orang-orang itu masing-masing telah melakukan
... bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan
... , perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu
... rus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh
... tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap
... perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana
... a pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana
... (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut
... tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak
... penjara dan pidana denda.

... yang dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu²⁸

ngkinan

Hamel mengatakan bahwa kealpaan (*culpa*) itu
... penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh
... sebagaimana diharuskan oleh hukum

... tindak pidana meliputi:

... hukum

... keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam
... (Dalam pasal 415 KUHP antara lain ditegaskan
... ditugasi menjalankan jabatan umum”).

... antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan

manusia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
konsisten dan konsekuen.
salah satu produk manusia dalam membangun
melalui interaksi yang berlangsung di masyarakat.
manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak
man bahwa setiap produk-produk hukum baik seperti
kan produk kepentingan manusia itu sendiri atau
h-kaidah yang ditemukan atas dasar imperatif
bagai tujuan, hampir selalu manusia individual ikut
uatu yang juga merupakan kepentingan orang lain

arahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-
jelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud
ndak pidana disinonimkan dengan delik, berasal dari
Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai

Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15
Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan
lmu Hukum, Volume. 8 Nomor. 1, Oktober 2020.

diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995
dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang
cukai. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk
pengendalian serta memberdayakan peranan cukai
negara sehingga menuntut perlunya penyempurnaan
dan kebijakan pemerintah.

pidana diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang terdapat
pidana cukai pada pasal tersebut meliputi tidak
tempat penyimpanan Barang Kena Cukai, tidak
Cukai sesuai aturan yang menimbulkan kerugian

Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana
9, Nomor 1 (2018), hlm. 13

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11

dan di bidang cukai yang sangat kuat dan bagus karena

tinggi baik itu pidana penjaranya maupun pidana

selama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 1 (satu)

sepuluh) kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya

dibayarkan.

Di samping itu, pengusaha mempunyai beberapa kewajiban yang

1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah

Undang-Undang Nomor 11

pengusaha Pabrik wajib mencatat dan membukukan

masuk ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik, di

melaporkan secara berkala kepada Kepala Kantor

kesengajaan Pengusaha pabrik rokok menghindari jenis produk rokok ilegal yang ditemukan di pasaran cukai sama sekali atau yang biasa disebut rokok palsu atau yang dipalsukan; milik orang lain, atau di miliknya sendiri namun pita cukai tersebut tarif rendah dari yang seharusnya (rokok sigaret kretek tangan). Melaksanakan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau maksud mengelakkan pembayaran cukai pidana dengan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha, Volume 4, Nomor 1, October 2008.

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam stelsel
na untuk tindak pidana Cukai diatur dalam Pasal 50
a penjara dan pidana denda. Sedangkan Pengaturan
al 7A sampai dengan 39 yang berupa izin Nomor
bekukan/dicabut dan sanksi administrasi berupa
ang telah dilarang dalam peraturan tersebut yang
kski pidana dapat diancam kepadanya.

Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan
esaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa
ersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti
i yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual
mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel,
anakan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum,

[/622672/pemda-diminta-aktif-berantas-rokok-ilegal](#) diases

ran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat

hwa;

iatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin
nda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

a untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha

kukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang

alah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor

dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang

suk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum

andang Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya

leh hakim.

undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

ng Nomor 39 tahun 2007 bersifat kumulatif dan

[kai-kembali-tegaskan-sanksi-pidana-rokok-ilegal-.html](#)

tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena pajak tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan paling banyak 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Undang-Undang Nomor 7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

yang memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan dokumen yang dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat keterangan cukai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

yang menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena pajak untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai.

Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

awarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual,
tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8
paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan
kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

07 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

simpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh,
ai yang diketahuinya atau patut harus diduganya
rkan undang-undang ini dipidana dengan pidana
n dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
ai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai

07 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

uka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda
undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara
ling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau
0.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling
s lima puluh juta rupiah).”

07 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

... (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
... susud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak
... sarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana
... un dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
... 000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau paling
... milyar rupiah).”

Rokok Di Indonesia

... endak dikenakan atas produk-produk terpilih yang
... gan hukum. Pendapatan Negara yang maksudnya
... ak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang
... n ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan

37

... pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia
... nya seperti sigaret, cerutu, serta rokok daun, yang
... Ketentuan ini berlaku dengan adanya UU No. 11
... nan yang mengacu pada UU No. 39 Tahun 2007.

Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai, Departemen

yang dikenakan cukai. Karakteristik tertentu yang
selectivity in Coverage (dikenakan terhadap objek-
s (dipungut untuk tujuan-tujuan tertentu), dan
da pengawasan fisik atau pengukuhan oleh otoritas

ang yaitu :

or 39 Tahun 2007 tentang *Cukai adalah pungutan
g-barang tertentu yang mempunyai sifat atau
undang ini.*

or 39 Tahun 2007 tentang Cukai, *Pabrik adalah
aman, dan lapangan yang merupakan bagian
menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk
n untuk penjualan eceran.*

omor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, *Tempat
/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari
n barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih
n, dijual, atau diekspor.*

g Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, *Tempat
enjual secara eceran barang kena cukai kepada*

*nungutan Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pelayanan Dan
Cukai Malang*". Jurnal Perpajakan (JEJAK). Melalui
22 Juli 2022, Pukul 17:44, hlm. 2

lain.

yang dibuat dari hasil tembakau rajangan yang telah
cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan
yang digunakan dalam pembuatannya.

h sebagai instrumen pengendalian konsumsi hasil
a nasional atau internasional mengendaki adanya
terhadap aspek kesehatan masyarakat. Salah satu
al yaitu rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun
n sejak tahun 2005. Meskipun hingga saat ini
i konvensi yang digagas oleh *World Health*

ukai seperti rokok juga diharapkan dapat menjadi
maan negara melalui pengenaan cukai barang. Oleh
ilegal dan pita cukai palsu harus dihapuskan karena
pendapatan negara melalui cukai rokok. Pemerintah
mbakau, Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau,

...sehingga berhasil akibat kapok yang memberikan
...an di bagian cukai terhadap produk tembakau dan
...asar. Pengenaan cukai, mengatur atau menentukan
...atau dapat saja disebut manfaat pengatur. Selaku
...tribusi cukai berlaku dalam berkontribusi terhadap
...peran yang sangat penting dalam APBN dalam
...terus meningkat dari tahun ke tahun.

Rokok Tidak Dilekati Pita Cukai di Indonesia

Tahun

...memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan
...penerimaan negara. Oleh karena itu, peningkatan
...n. Perokok termiskin lebih sensitif terhadap harga
...sehingga kebijakan peningkatan harga rokok melalui
...melindungi penduduk termiskin dari kecanduan dan

uang.

cukai rokok per-tahun sebagai salah satu faktor sifat ilegal, permintaan masyarakat juga sangat merupakan aktivitas yang tidak asing lagi bagi kita, sekarang ini, kegiatan ini dapat kita temui dimana mana, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, tempat pendidikan seperti sekolah dan kampus. Merokok menjadi kerugian, baik dari segi sosial, moral, ekonomi dan kesehatan yang mengakibatkan kematian atau penurunan Sumber

[cukai-bea-cukai-gerebek-pabrik-rokok-ilegal-di-semarang](#)

[pemerintah-diminta-kaji-dampak-kenaikan-cukai-rokok-ke-](#)

[bismillah%20fix.pdf](#) (diakses pada 15 Juli 2022 pukul 08:28)

Tindak Tidak Dilekati Pita Cukai di Indonesia

laran rokok ilegal Pemidanaan bukanlah merupakan
an juga bukan merupakan satu-satunya cara untuk
Ada banyak cara yang dapat ditempuh, dengan
menggunakan cara di luar hukum pidana.

diutamakan daripada upaya yang bersifat represif.

ri efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih

Dalam dunia kedokteran criminal telah disepakati

n lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat

berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai

dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa

yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-

g baik dan sarana sarana lain yang dapat mengekang

pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan”, Jurnal Ilmu

minologi Pembangunan, GHalia Indonesia, Jakarta, hlm. 167

rum dalam mencegah tindak pidana peredaran rokok

upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang

lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah

hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan

a, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya

inial. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu

alui penegakan hukum pidana yang rasional untuk

at jalur non penal atau di luar hukum pidana lebih

atau preventif. Oleh karena upaya penanggulangan

an pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran

an Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Mimbar Hukum,

ori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1998), hlm. 148

hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim yang berwenang pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada

di lingkungan peradilan umum. Salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan adalah yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan keseimbangan. Oleh karena itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, dan pertimbangan hakim tersebut akan akan dibatalkan

3⁴⁷.

pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal yang akan mempengaruhi keputusan yang dijatuhkan hakim pada mahkamah. (Mardiana, 2010: 100).
data Pada Pengadilan Agama, Cet V, Yogyakarta, Pustaka

yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada sebagai aplikator Undang-undang harus memahami perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai manfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran yang memuat pertimbangan tata nilai budaya yang filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti masyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut dan dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁸

saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah sesuai dengan tujuan dari hukum. Ada dua indikator bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari,

(tanggal 17 Juli 2022 pukul 18.31 WIB)

Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.⁴⁹

tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta
imbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang

ana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan
karenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan
a. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan
an tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat
n dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan
il penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam
pengadilan.

san Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit

i dakwakan

m juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang
tut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata
kum seperti apa yang telah undang-undang jelaskan
wakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis
rin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang
limitatif menetapkan pendirian hakim dalam
hingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti
lakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan

ir merupakan dokumen hukum yang dibuat dan
mum yang memegang suatu perkara pidana dan
kara tersebut. Pada

(1) KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang
ami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough,
uan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu
a tidak bernilai apa-apa. Didalam KUHP Pasal 184
terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam
akwa di dalam persidangan diberikan kesempatan
gan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang
meskipun seorang terdakwa memiliki hak ingkar

g bukti tidak diatur secara jelas terkait dengan
amzah barang bukti dalam perkara pidana adalah
a delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang

penelitian ini dilakukan dengan analisis dan konstruksi yang metodologis, sistematis dan konsisten.

Penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana dan putusan terhadap pelaku tindak yang tanpa izin mengelakkan pembayaran cukai.

Penelitian Yang Tanpa Izin Menjalankan Kegiatan Pabrik

Cukai akan dilakukan dengan Penelitian Normatif, menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, buku referensi dan sumber dari internet yang

...dengan penguatan negara yang menekankan terhadap
... mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan
... erimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan,

...esia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

...dana (KUHP).

...m penelitian ini hanya menggunakan sumber data

...aan yang mengikat yang bersumber dari peraturan

... yang akan dilakukan dalam sebuah hukum.

...dalam penelitian ini adalah:

ukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan karya ilmiah.

ukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan sekunder berupa kamus , bahan dari internet, dan

mana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum m memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Normatif Kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pabrik dengan maksud mengelakkan pembayaran (2021/PN.Jpa); dan mengetahui bagaimana dasar usan terhadap pelaku tindak pidana yang tanpa izin

